

**PENYEBAB PERCERAIAN PADA PENGADILAN AGAMA  
MAKASSAR, MAROS, DAN SUNGGUMINASA.  
(Studi Perbandingan Tahun 2011-2013)**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar  
Sarjana Hukum Islam Jurusan Peradilan Agama  
pada Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
MAKASSAR

Oleh:

ISMI ABDULLAH

NIM: 10100110017

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UIN ALAUDDIN MAKASSAR

2014

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ismi Abdullah  
Tempat/tgl. Lahir : Makassar, 06-September-1992  
Jurusan : Peradilan Agama  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Alamat : Jl. Kumala 2 Lrng 1 No. 23, Makassar  
Judul : Penyebab Perceraian Pada Pengadilan Agama  
Makassar, Maros, dan Sungguminasa. (Studi  
Perbandingan Tahun 2011-2013).

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian ataupun seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 13 Agustus 2014

Penyusun,

ISMI ABDULLAH  
NIM: 10100110017

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

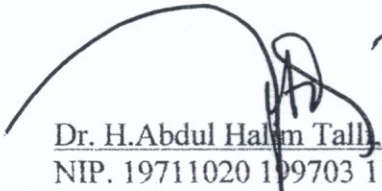
Pembimbing penulisan Skripsi Saudari **Ismi Abdullah**, NIM: 10100110017, Mahasiswa Jurusan Peradilan Agama pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul, "Penyebab Perceraian pada Pengadilan Agama Makassar, Maros, dan Sungguminasa (Studi Perbandingan Tahun 2011-2013)", memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqasyah*.

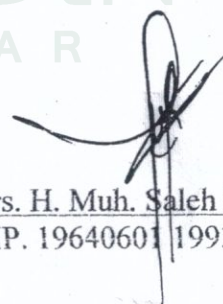
Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses lebih lanjut.

Makassar, 15 Agustus 2014

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. H. Abdul Halim Talli, S.Ag., M.Ag  
NIP. 19711020 199703 1 002

  
Drs. H. Muh. Saleh Ridwan, M.Ag  
NIP. 19640601 199303 1 003

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Penyebab Perceraian pada Pengadilan Agama Makassar, Maros, dan Sungguminasa. (Studi Perbandingan Tahun 2011-2013)”, yang disusun oleh Ismi Abdullah, NIM: 10100110017, Mahasiswa Jurusan Peradilan Agama pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada Senin, tanggal 25 Agustus 2014 M, bertepatan dengan 29 Syawal 1435 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah dan Hukum, Jurusan Peradilan Agama (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 25 Agustus 2014  
29 Syawal 1435 H

### DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. H. Ali Parman, MA	(.....)
Sekretaris	: Dra. Sohras, M.Ag	(.....)
Munaqisy I	: Dra. Hj. Hartini Tahir, M.Hi	(.....)
Munaqisy II	: Andi Intan Cahyani, S.Ag., M.Ag	(.....)
Pembimbing I	: Dr. H. Abd. Halim Talli, S.Ag, M. Ag	(.....)
Pembimbing II	: Drs. H. Muh. Saleh Ridwan, M. Ag	(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Alauddin Makassar,



Prof. Dr. H. Ali Parman, M.A  
NIP. 19578414 198603 1 003

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. demikian pula salam dan shalawat penulis peruntukkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat-sahabat dan seluruh ahlul bait di dunia dan akhirat.

Dengan selesainya penyusunan Skripsi yang berjudul **“PENYEBAB PERCERAIAN PADA PENGADILAN AGAMA MAKASSAR, MAROS, SUNGGUMINASA (Studi Perbandingan Tahun 2011-2013)”** Penulis patut menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak. Karena sedikit atau banyaknya bantuan mereka, menjadikan penulis mewujudkan karya ilmiah ini. Berkenaan dengan itu, teruntuk kedua orang tuaku (Abdullah Gassing dan Aidar) atas semua yang telah engkau berikan kepadaku, nasehat, doa dan didikannya dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada:

1. Ayahanda Rektor UIN Alauddin Makassar Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing HT., MS dan Segenap Pembantu Rektor yang dengan kebijaksaaannya sehingga penulis merasa diri sebagai warga kampus insane akedimisi.
2. Ayahanda Prof. Dr. H. Ali Parman, MA selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
3. Ayahanda Dr. H. Abdul Halim Talli, S. Ag, M. Ag. Selaku Ketua Jurusan Peradilan Agama Uin Alauddin Makassar sekaligus sebagai Pembimbing I.
4. Ibunda A. Intan Cahyani, M.Ag selaku Sekertaris Jurusan Peradilan Agama UIN Alauddin Makassar.
5. Drs. H. Muh. Saleh Ridwan, M.Ag selaku pembimbing II penulis tiada henti memberikan semangat dan masukan sehingga Skripsi dapat diselesaikan dengan baik.

6. Seluruh pegawai-pegawai tata usaha Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan pelayanan dengan baik sehingga penulis tidak menemukan kesulitan dalam penyusunan Skripsi ini.
7. Seluruh elemen Pengadilan Agama Makassar, Maros, dan Sungguminasa atas bantuannya dalam memberikan data-data yang penulis butuhkan.
8. Teman-teman Peradilan Agama angkatan 2010 yang sedikit banyak memberikan ide sehingga skripsi ini dapat berkembang, terkhusus untuk Muh. Taufiq Al-Hidayah, yang berkat dukungan penuh dan menjadi inspirator penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Billahitaufiqwalhidayah

Wassalamu Alauikum Wr. Wb.

Makassar, 28 Agustus 2014

Penulis

ISMI ABDULLAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
PERNYATAAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
ABSTRAK.....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1-10</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian.....	6
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Tujuan Kegunaan Penelitian.....	10
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIS.....</b>	<b>11-32</b>
A. Definisi Perceraian.....	11
B. Dasar Hukum Perceraian.....	12
C. Macam-macam Bentuk Perceraian.....	14
1. Talak.....	14
2. Khulu.....	19
3. Li'an.....	22
4. Zhihar.....	25
5. Ila'.....	30
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>33-36</b>
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	33
B. Pendekatan Penelitian.....	33
C. Populasi dan Sampel.....	33
D. Metode Pengumpulan Data.....	34



E. Teknik Pengumpulan Data.....	35
F. Instrumen Penelitian.....	35
G. Metode Pengolahan dan Analisis Data.....	36
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>37-58</b>
A. Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Pada Pengadilan Agama Makassar, Maros, dan Sungguminasa Kurun Waktu 2011-2013....	37
B. Persamaan Dan Perbedaan Faktor Penyebab Perceraian Kurun Waktu 2011-2013 pada Pengadilan Agama Makassar, Maros, dan Sungguminasa.....	54
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>59-58</b>
A. Kesimpulan.....	59
B. Implikasi Penelitian.....	61
C. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	63
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	65
RIWAYAT HIDUP.....	79



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Presentase penyebab perceraian di PA. Makassar, PA. Maros, dan PA. Sungguminasa.....	37
Table 2.	Penyebab Perceraian Dalam Bentuk Jumlah Kasus.....	38
Tabel 3.	Jumlah penduduk di Tiga Kabupaten/Kota.....	57



## ABSTRAK

Nama : Ismi Abdullah  
NIM : 10100110017  
Judul :PENYEBAB PERCERAIAN pada PENGADILAN AGAMA  
MAKASSAR, MAROS dan SUGGUMINASA (Studi Perbandingan  
Tahun 2011-2013)

---

Pokok masalah penelitian ini adalah Penyebab Perceraian Pada Pengadilan Agama Makassar, Maros, dan Sungguminasa? Pokok masalah tersebut memunculkan submasalah atau pertanyaan penelitian, yaitu: (1) Bagaimana faktor penyebab terjadinya perceraian pada Pengadilan Agama Makassar, Maros, dan Sungguminasa kurun waktu 2011-2013?, (2) Bagaimana Persamaan dan Perbedaan faktor penyebab perceraian kurun waktu 2011-2013 pada Pengadilan Agama Makassar, Maros, dan Sungguminasa?

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis dan pendekatan Syar'i. Data yang diperoleh dari putusan Pengadilan Agama Makassar, Maros, dan Sungguminasa yang sudah putus atau berkekuatan hukum tetap (BHT). Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan penelusuran referensi. Teknik pengelolaan data dan analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu: *Editing*, *Cooding* (pengkodean), dan Tabulasi data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penyebab perceraian di Pengadilan Agama Makassar, Maros, dan Sungguminasa tahun 2011-2013 sebagai berikut: a. Penyebab Moral, b. Penyebab Meninggalkan Kewajiban (Kawin Paksa, Ekonomi, dan Tidak Ada Tanggung jawab, c. Kawin di bawah umur, d. Penyebab Menyakiti Jasmani, e. di hukum, f. Cacat Biologis, g. terus menerus berselisih. Adapun persamaan faktor penyebab perceraian ketiga pengadilan Agama tersebut terletak pada pedoman ketiga pengadilan tersebut yang sama dalam mengkategorikan penyebab perceraian, yakni menggunakan UU. No. 7 Tahun 1974 tentang perkawinan, PP. No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sedangkan perbedaannya terletak pada jumlah perkara pada ketiga pengadilan tersebut dengan dominan Pengadilan Agama Makassar, disebabkan beberapa hal: a. Jumlah penduduk yang padat, b. Daerah Transmigran, c. Tingkat pendidikan perempuan yang hampir sebanding dengan laki-laki, d. Daerah wisata.

Implikasi penelitian ini adalah: (1) Menjadi rujukan bagi para pengambil kebijakan ataupun pemerintah dalam mengurangi jumlah angka perceraian atau setidaknya dapat mencari solusi yang konkret bagi permasalahan perceraian yang semakin tahun menunjukkan kenaikan yang signifikan. (2) Menjadi rujukan bagi tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam mengurangi angka perceraian yang terjadi di lingkungan mereka. (3) Menjadi sumber ilmu terhadap orang yang menggunakannya.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan merupakan sunnah Rasul. Allah SWT. menjadikan Perkawinan dengan tujuan memakmurkan bumi, memperbanyak keturunan, dan menjadi keperluan keberlangsungan ras manusia. Allah SWT. Q.S. Ar-Ra'd/13: 38.

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا هُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِغَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

Terjemahnya :

Dan Sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. bagi tiap-tiap masa ada kitab (yang tertentu)<sup>1</sup>.

Perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>2</sup>.

Dengan adanya suatu perkawinan, maka seorang laki-laki yang menjadi suami memperoleh berbagai hak suami dalam keluarga, begitupun seorang perempuan yang mengikatkan diri menjadi istri dalam suatu perkawinan memperoleh berbagai hak pula. Disamping itu sebagai mana lazimnya mereka

---

<sup>1</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.(Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), h. 254.

<sup>2</sup> A. Sholihul, *Undang-Undang Perkawinan: dilengkapi Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Rona Publishing, 2012), h. 8

pun memikul berbagai kewajiban sebagai akibat penggabungan dan keterikatan diri dalam keluarga hasil perkawinan. Hak dan kewajiban itu ditegaskan dalam Al-Qur'an dan hadits Rasulullah yang terakomodir dalam Kompilasi Hukum Islam (Indonesia) pada bab XII pasal 77-84<sup>3</sup>.

Keluarga yang kekal dan bahagia, itulah yang menjadi tujuannya. Banyak perintah Allah dan Rasul bermaksud untuk ketentraman keluarga selama hidup. Allah menyuruh seorang suami menggauli istrinya dengan baik dan memberikan peringatan bahwa seorang suami jika tidak senang kepada istrinya, boleh jadi Allah menjadikan sesuatu yang sangat baik dalam diri istri yang tidak disenangi sang suami, hal itu tertuang pada Qs An-Nisa/2: 19. Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa ketika ada perasaan tidak senang dari suami kepada istri hendaklah suami tetap menggauli istrinya dengan baik dan jangan menceraikannya. Pertengkaran berat antara suami istri juga tidak dapat langsung menjadikan suami ataupun istri bercerai begitu saja, diperlukan prosedur syiqaaq (Pertengkaran) yang tertuang pada firman Allah Qs An-Nisa/2: 35.

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Terjemahnya :

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal<sup>4</sup>.

---

<sup>3</sup>A. Sholihul, *Undang-Undang Perkawinan: dilengkapi Kompilasi Hukum Islam*, h. 122-126.

<sup>4</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. h.84.

Namun, ketika suami dan istri tidak dapat lagi disatukan oleh para hakim (wakil) dari kedua belah pihak dan tak mampu mengadakan perbaikan antara suami dan istri, maka talak ataupun cerai gugat dapat ditempuh keduanya. Dalam kondisi Allah SWT mensyariatkan perpisahan sebagai jalan keluar bagi keduanya.

Qs Ath – Thalaq/65: 1.

يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Terjemahnya :

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu, Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru<sup>5</sup>.

Dalam ayat diatas dapat dimaknai bahwa suami harus memperhatikan ketika ingin menceraikan istrinya, tidak menjatuhkan talak ketika istri sedang hamil ataupun nifas merupakan salah satu aspek yang harus diperhatikan. Pun ketika jatuh talak bukan berarti kewajiban suami juga gugur, suami tidak boleh mengeluarkan istri dari rumahnya kecuali istri memiliki akhlak yang jelek (keji).

Talak dibolehkan menurut syar'i namun hukumnya makruh karena Islam menganjurkan untuk senantiasa menjaga kelanggengan hidup berumah tangga. Stabilitas rumah tangga dan kontinuitas kehidupan suami istri adalah tujuan utama adanya Perkawinan dan hal ini sangat diperhatikan oleh syariat Islam. Oleh sebab

<sup>5</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*..h. 558

itu, menjatuhkan talak tanpa alasan yang dibenarkan merupakan perbuatan dosa. Perbuatan Talak dibenci oleh Allah Swt. Rasulullah bersabda.

أَبْغَضُ الْحَلَالِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ

Artinya : perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak<sup>6</sup>.

Setiap perceraian, pasti ada sebab yang mengawalinya. Tidak bisa masing-masing bersikeras atas kemauannya sendiri ataupun mendahulukan kehendak masing-masing tanpa adanya kompromi dan musyawarah yang dilandasi kesabaran dan ketaqwaan kepada Allah SWT. Perceraian tidak akan pernah terjadi apabila antara kedua pasangan suami istri tidak mengalami gangguan dalam kehidupan keluarganya. Perceraian (Talak) akan membawa seseorang sadar bahwa hidup berumah tangga sangat rentan dari gangguan dari pihak lain. Selain gangguan dari pihak ketiga, faktor ekonomi dan tingkat kepuasan seks pasangan suami istri juga menjadi pemicu kasus perceraian<sup>7</sup>.

Di Indonesia kasus perceraian ataupun gugatan perceraian masuk dalam bidang perkawinan menjadi wewenang absolut Peradilan Agama yang termuat dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 49. Peradilan Agama adalah salah satu diantara Peradilan Khusus sama halnya seperti Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, yakni melaksanakan perkara “tertentu”

---

<sup>6</sup> H.R. Abu dawud: 1863 dari Ibnu Umar, Ibnu Majah: 2008, dan dibenarkan oleh Al – Hakim.

<sup>7</sup> “Tidak Organisme Pemicu Perceraian di Makassar” (Liputan), *Tribun Timur*, 2 November 2013.

dan terhadap rakyat “tertentu”<sup>8</sup>. Untuk penjelesan lebih lanjut mengenai “Perkara tertentu “dan “Rakyat tertentu” dapat dilihat dalam pasal 2 dan 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Kasus perceraian baik karena Talak ataupun cerai gugat menjadi kasus yang terbanyak ditangani oleh Pengadilan Agama pada umumnya. Sebagai gambaran awal jumlah kasus perceraian pada lingkup Pengadilan Agama Makassar, Maros, dan Sungguminasa tahun 2013 sebagaimana penulis kutip dari salah satu media cetak Tribun Timur edisi Sabtu 2 November 2013 di halaman 17.

1. Pengadilan Agama Makassar dengan jumlah kasus cerai talak sebanyak 491 dan cerai gugat 1152.
2. Pengadilan Agama Maros dengan jumlah kasus perceraian cerai talak sebanyak 304.
3. Pengadilan Agama Sungguminasa dengan jumlah kasus cerai talak sebanyak 162 dan cerai gugat 482.

Realitas diatas menunjukkan betapa tingginya angka perceraian yang terjadi pada ketiga Pengadilan tersebut. Inipun masih pada tiga Pengadilan Agama, belum mencakup semua Pengadilan Agama khususnya di Sulawesi Selatan.

Bertitik tolak dari hal diatas, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai angka perceraian dan faktor penyebabnya dengan harapan dapat memberikan gambaran mengenai hal tersebut.

---

<sup>8</sup> Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman”, pasal 25 Ayat (3).



## ***B. Rumusan Masalah***

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka masalah pokok dalam penelitian ini adalah Penyebab Perceraian Pada Pengadilan Agama Makassar, Maros, dan Sungguminasa.

Berdasarkan pokok masalah diatas sekaligus memperjelas masalah yang akan diteliti, maka dapat di identifikasikan masalah yang hendak dikaji, yaitu:

1. Bagaimana faktor penyebab terjadinya perceraian pada Pengadilan Agama Makassar, Maros, dan Sungguminasa kurun waktu 2011-2013?
2. Bagaimana Persamaan dan Perbedaan faktor penyebab perceraian kurun waktu 2011-2013 pada Pengadilan Agama Makassar, Maros, dan Sungguminasa?

## ***C. Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian***

### **1. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kekeliruan penafsiran terhadap pengertian yang sebenarnya, maka penulis menjelaskan beberapa kata dalam judul skripsi ini :

“*Penyebab*” berasal dari kata *sebab* yang berarti hal yang menjadikan timbulnya sesuatu, lantaran, karena, (asal) mula. Sedangkan *Penyebab* adalah yang mengakibatkan<sup>9</sup>.

“*Perceraian*”, berasal dari kata cerai yang berarti pisah, putus hubungan suami istri. Sedangkan *Perceraian* adalah perbuatan menceraikan<sup>10</sup>. Dalam perbuatan cerai terdapat dua pelaku yakni jika laki-laki yang melakukannya disebut Talak dan jika perempuan yang melakukannya disebut Khulu’(cerai

---

<sup>9</sup>Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia* ,(Jakarta: Pustaka Bahasa, 2008) h.1277.

<sup>10</sup>Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*, h.281.

gugat). Adapun pengertian dari Talak adalah melepaskan ikatan tali Perkawinan atau sebagiannya<sup>11</sup> sedangkan Khulu' (cerai gugat) adalah talak yang diucapkan oleh suami kepada istri atas permintaannya dengan adanya pembayaran dari istri<sup>12</sup>.

Sementara pengertian Pengadilan Agama tercantum dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu Peradilan Agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.

Dapat disimpulkan bahwa Peradilan Agama adalah salah satu dari peradilan Negara di Indonesia yang sah, yang bersifat peradilan khusus, yang berwenang dalam jenis perkara perdata Islam tertentu, bagi orang-orang Islam di Indonesia<sup>13</sup>.

Jadi pengertian judul yang dimaksud dalam skripsi ini adalah studi tentang penyebab perceraian di Pengadilan Agama Makassar, Maros, dan Sungguminasa adalah apa yang mengakibatkan atau apa dasar dari putusannya hubungan suami atau istri di Pengadilan Agama Makassar, Maros, dan Sungguminasa.

---

<sup>11</sup> At-Tuwaijiri, Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah, *Ensiklopedi Islam Al – Kamil*, ed. Budiasyah (Cet. XIII; Jakarta: Darus Sunnah Press, 2011), h.1052.

<sup>12</sup> At-Tuwaijiri, Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah, *Ensiklopedi Islam Al – Kamil*, ed. Budiasyah, h. 1062.

<sup>13</sup> Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia*, (Yogyakarta; UIN Malang Press, 2008),h. 16.

## 2. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Pengadilan Agama Makassar, Maros dan Sungguminasa dengan batasan objek penelitian terhadap kasus perceraian yang sudah putus atau telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT).

### *D. Kajian Pustaka*

Untuk menyelesaikan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa literatur yang ada kaitanya dengan judul skripsi ini, adapun literatur-literatur yang penulis baca dan kutip dalam menyelesaikan pembahasan ini diantaranya:

1. Fikih Talak berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah oleh Amru Abdul Mun'im Salim: buku ini membahas mengenai pandangan berbagai ulama mengenai Talak (perceraian) dan mekanismenya.
2. 15 Penyebab Perceraian dan Penanggulangannya oleh Drs. M. Thalib: buku ini membahas mengenai penyebab-penyebab perceraian dan penanggulangannya berdasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW serta bagaimana upaya penanggulangannya.
3. Fikih Perempuan (Muslimah) oleh Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi: buku ini membahas mengenai penyebab Talak (perceraian) pada umumnya dan dampak yang ditimbulkannya.
4. Perkawinan Dalam Syariat Islam oleh Prof. Abdul Rahman I. Doi, Ph. D: buku ini membahas mengenai bubarnya perkawinan.
5. Fikih Munakahat oleh Drs. H. Abd. Rahman Ghazaly, M.A: buku ini membahas mengenai putusnya perkawinan dan sebab-sebab putusnya perkawinan.

6. Hukum Perkawinan Islam oleh Mohd. Idris Ramulyo,. S.H., M.H. :  
Buku ini membahas mengenai seluk beluk perkawinan dan tata cara pemutusan hubungan perkawinan.
7. Hukum Islam dan Peradilan Agama oleh Prof. H. Mohammad Daud Ali S.H: Buku ini membahas mengenai perkembangan Peradilan Agama prospek Peradilan Agama di Indonesia serta peluang dan Tantangannya.

Sejauh pengamatan penulis, judul ini belum pernah dibahas oleh siapa pun dalam bentuk skripsi, tesis atau disertasi. Namun, tulisan yang menyinggung judul ini, pernah diangkat oleh Drs. Syamsu Alam, S.H, M.H dalam bukunya Reformasi Peradilan Agama di Indonesia<sup>14</sup>, dengan judul “Pengaruh Usia Perkawinan Terhadap Kondisi Sosial-Ekonomi Masyarakat”. Kemudian, yang menjadi perbedaan antara tulisan tersebut dengan skripsi ini terletak pada:

#### 1. Lokasi Penelitian

Penulis mengambil lokasi penelitian pada Pengadilan Agama Makassar, Maros dan Sungguminasa. Sedangkan tulisan tersebut mengambil lokasi penelitian pada Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Makassar.

#### 2. Tahun diadakannya penelitian (Perbandingan Tahun).

Penulis mengambil tahun perbandingan dari tahun 2011-2013 sedangkan tulisan tersebut tahun 1996-1998.

---

<sup>14</sup> Andi Syamsul Alam, *Reformasi Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Yapensi, 2004), h.62.

Dengan demikian, tulisan ini disamping dapat dipertanggungjawabkan obyektivitasnya juga diharapkan menjadi cakrawala baru mengenai Penyebab Perceraian Pada Pengadilan Agama, Makassar, Maros, dan Sungguminasa.

#### ***E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian***

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini ada 2 (dua) hal :

1. Untuk mengetahui apa faktor penyebab terjadinya perceraian pada Pengadilan Agama Makassar, Maros, dan Sungguminasa kurun waktu 2011-2013.
2. Untuk mengetahui apa Persamaan dan Perbedaan faktor penyebab perceraian kurun waktu 2011-2013 pada Pengadilan Agama Makassar, Maros, dan Sungguminasa.

Kegunaan Penelitian adalah sebagai berikut :

a) Kegunaan Ilmiah

Dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu keIslaman pada khususnya.

b) Kegunaan Praktis

Dapat dijadikan acuan ataupun dasar dari pengambilan keputusan ataupun kebijakan dalam menangani kasus perceraian pada lingkup Pengadilan Agama pada umumnya dan pemerintah pada khususnya.

## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS

#### *A. Definisi Perceraian*

Untuk lebih mengetahui lebih jauh mengenai perceraian, berikut dipaparkan definisi beberapa ahli yang dikutip dari berbagai sumber.

Dalam kitab *Al-Mughni*, jilid VII, halaman 98, dikatakan bahwa yang dimaksud dengan talak yang berdasarkan sunnah adalah talak yang sesuai dengan perintah Allah SWT dan perintah Rasul-Nya, yaitu menjatuhkan talak kepada istri dalam keadaan suci tanpa dicampuri menjelang ia diceraikan<sup>1</sup>.

Al-Jaziri dalam kitabnya *Al Fiqh Alal Mazhabil Arba'ah* memberikan definisi tentang talak. Thalaq ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan mempergunakan kata-kata tertentu<sup>2</sup>.

Assayid Sabiq dalam kitabnya *Fiqhi Sunnah* memberikan definisi talak. Thalaq ialah melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri<sup>3</sup>.

Abu Zakaria Al Anshari dalam kitabnya *Fathul Wahab* memberikan definisi thalaq. Thalaq ialah melepas tali akad Nikah dengan kata thalaq dan yang semacamnya<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> Muhammad Jawad Mughniyah., *FIQIH Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'I, Hambali*, Ed. Masykur A.B, Afif Muhammad Idrus Al Kaff (Cet. V; Jakarta: Lentera, 2006), h.444

<sup>2</sup> Direktorat Jendral Pembinaan kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqh Jilid II*, (Cet. II; Jakarta:Departemen Agama, 1984), h. 226.

<sup>3</sup> Direktorat Jendral Pembinaan kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqh Jilid II*, h. 226.

Jadi dapat disimpulkan bahwa perceraian (Talak) adalah putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri dengan kata-kata talak dan semacamnya.

### **B. Dasar Hukum Perceraian**

Perceraian merupakan hal yang harus lebih bisa dihindari oleh setiap suami istri. Para suami atau istri terlebih dulu melakukan proses negosiasi atau pencarian solusi agar perceraian bisa dihindari. Firman Allah Swt Q.S. An Nisa/2: 35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Terjemahnya :

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal<sup>5</sup>.

Dengan mengirim seorang hakam atau penengah, namun apabila gagal maka perceraian menjadi solusi terakhir yang dapat diambil.

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴿٣٦﴾

<sup>4</sup> Direktorat Jendral Pembinaan kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqh Jilid II*, h. 226.

<sup>5</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 84.



Terjemahnya:

Jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana<sup>6</sup>. Q.S. An-Nisa/2: 130.

Perceraian (talak) harus dilakukan satu demi satu hingga tiga kali, hal ini sama dengan masa tenggang haid atau suci (Quru'). Ini di mungkin agar pasangan ini bermunasabah atau berintrospeksi diri kekurangan -kekurangan atau ada hak ataupun kewajiban yang tidak dilaksanakan oleh kedua pasangan suami istri tersebut.

Kemudian perceraian tidak dapat dilakukan selama wanita dalam keadaan haid. Ada 2 alasan mengapa perceraian tidak boleh dilakukan ketika wanita sedang haid:

- 1) Selama masa haid, wanita biasanya menjadi lesu dan mudah marah. Perubahan, yang terjadi dalam tubuh mereka, membuat mereka melakukan sesuatu yang tidak seharusnya mereka lakukan. Hal ini menerangkan mengapa percekcoakan, yang terjadi antara suami dan istri selama masa haid, yang terjadi antara suami dan istri selama masa haid, tidak dianggap sebagai penyebab yang cukup untuk dilakukannya perceraian<sup>7</sup>.
- 2) Selama masa ini, hubungan badani, yang merupakan faktor penting dalam keakraban pasangan itu, tidak dapat dilakukan. Hal ini dapat menimbulkan ketegangan di antara mereka. Tetapi, bila gangguan

---

<sup>6</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 99.

<sup>7</sup> Abul A'la Al-Maududi dan Fazl Ahmed, *Pedoman Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: Darul Ulum Press, 1999), h. 37.

bulanan itu tak ada lagi , kemesraan dan ketenangan dalam hubungan seksual dapat menghapuskan nafsu perceraian dari benak suami, dan pasangan itupun dapat bersatu kembali, sekali lagi, dalam persatuan yang utuh<sup>8</sup>.

Rasulullah SAW. pun tidak menyetujui dilakukan perceraian dalam masa haid. Abdullah Bin Umar menceraikan istrinya dalam masa haid. Khalifah Umar melaporkan hal ini kepada Nabi. Beliau cemas dan berkata kepada Umar untuk menyuruh anak laki-laknya kembali kepada istrinya dan menceraikannya setelah ia suci.

### ***C. Macam-macam Bentuk Perceraian***

#### **1) Talak**

##### **a. Definisi Talak**

Talak adalah melepaskan hubungan suami istri dengan perkataan. Talak merupakan jalan atau solusi jika keadaan rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan, tidak ada lagi rasa kasih dan sayang terhadap keduanya maka Allah mensyariatkan atau memberikan jalan perpisahan dalam Q.S. Ath-Thalaq/65:1.

Pemilik talak adalah suami dengan jumlah sebanyak 3 kali, di karenakan dialah yang berusaha mempertahankan hubungan suami istri dan memberi nafkah untuknya, serta dia lebih bersabar dan berfikir panjang dengan akal nya bukan dengan perasaannya. Firman Allah Swt. Q.S. An-Nisa/2: 34.

---

<sup>8</sup> Abul A'la Al-Maududi dan Fazl Ahmed, *Pedoman Perkawinan dalam Islam*, h. 37.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالْصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأْضَرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣١﴾

Terjemahnya:

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) **telah menafkahkan sebagian dari harta mereka**. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar<sup>9</sup>.

Sedangkan perempuan cepat emosi, kurang tabah, pendek pandangannya, dan tidak mempunyai konsekuensi dari talak seperti yang terdapat pada pria. Seandainya talak dimiliki setiap suami dan istri sungguh kondisi talak berlipat ganda jumlahnya dengan sebab yang sepele sekalipun.

#### b. Rukun Talak

- 1) Harus diucapkan dengan kata-kata atau ucapan
- 2) Ucapan talak harus dapat di dengar, paling tidak untuk dirinya sendiri.
- 3) Harus menggunakan bahasa yang jelas dan mengandung arti perceraian.

#### c. Macam-macam Talak

- 1) Talak Raj'i

<sup>9</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 84.

Talak Raj'I adalah talak satu atau, dimana suami berhak rujuk selama istri masa dalam masa iddah<sup>10</sup>. Sedangkan menurut Dr. As Siba'i, Talak Raj'I adalah talak yang untuk kembalinya bekas istri kepada bekas suaminya tidak memerlukan perbaruan akad nikah, tidak memerlukan mahar serta tidak memerlukan persaksian<sup>11</sup>.

Setelah terjadinya talak Raj'I maka istri wajib beriddah, hanya bila kemudian suami hendak kembali kepada bekas istri sebelum berakhir masa iddah, maka hal itu dapat dilakukan dengan menyatakan rujuk, tetapi jika dalam masa iddah tersebut bekas suami tidak menyatakan rujuk terhadap bekas istri, maka dengan berakhirnya masa iddah itu kedudukan talak menjadi talak Ba'in, kemudian jika sesudah berakhirnya masa iddah itu suami ingin kembali kepada bekas istrinya wajib dilakukan dengan akad nikah baru dan dengan mahar yang baru pula.

Firman Allah Swt. Q.S. Al Baqarah/2: 229. Dalam ayat ini memberikan makna bahwa thalaq yang di syariatkan Allah ialah talak yang dijatuhkan satu demi satu, tidak sekaligus, dan bahwa suami boleh memelihara kembali bekas istrinya setelah talak pertama dan kedua dengan baik. Disunnahkan istri berhias dan berdandan untuk menarik perhatian dan cinta suami, sedangkan suami tidak boleh mengeluarkan istri dari rumah sampai habis masa iddahanya.

---

<sup>10</sup> A. Sholihul, *Undang - Undang Perkawinan: dilengkapi Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Rona Publishing, 2012), h. 138

<sup>11</sup> Direktorat Jendral Pembinaan kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqh Jilid II*, h. 230.

## 2) Talak Ba'in

Talak bain adalah talak yang tidak diberi hak merujuk bagi bekas suami terhadap bekas suami terhadap bekas istrinya, untuk mengembalikan bekas istri kedalam ikatan perkawinan dengan bekas suami harus melalui akad baru, lengkap dengan rukun dan syaratnya. Jenis talak ini ada dua macam:

### a) Talak Ba'in Sugra

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 119 ayat (1) Talak Ba'in Sugra adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah<sup>12</sup>. Dapat pula diartikan yakni menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap bekas istri tetapi tidak menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas istri, artinya bekas suami boleh mengadakan nikah baru dengan bekas istri baik dalam masa iddahnya maupun sesudah berakhirnya masa iddahnya. Sedangkan alasan talak ini seperti yang dimuat pada ayat (2) yakni: talak yang terjadi *qabla dukhu*, talak dengan tebusan atau khuluk, dan talak yang dijatuhkan oleh pengadilan Agama.

### b) Talak Ba'in Kubra

Dalam KHI pasal 120 yang dimaksud Talak Ba'in Kubra adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila Perkawinan itu dilakukan setelah bekas istri,

---

<sup>12</sup> A. Sholihul, *Undang - Undang Perkawinan: dilengkapi Kompilasi Hukum Islam*, h. 138

menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *Ba'da Al Dukhul* dan habis masa iddahnya<sup>13</sup>.

### 3) Talak Sunni

Dalam KHI pasal 121 yang dimaksud Talak Sunni adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan kepada istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut<sup>14</sup>. Talak ini memiliki empat syarat:

- a) Istri yang di talak sudah pernah dikumpuli, bila talak dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah dikumpuli, tidak termasuk talak sunni.
- b) Istri dapat segera melakukan iddah suci setelah di talak, yaitu dalam keadaan suci dari haid.
- c) Talak yang dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci, baik dipermulaan suci, dipertengahan maupun di akhir suci kendati beberapa saat lalu datang haid.
- d) Suami tidak pernah mengumpuli istri selama masih suci dalam mana talak itu dijatuhkan. Talak dijatuhkan oleh suami ketika istri dalam keadaan suci dari haid tetapi pernah dikumpuli, tidak termasuk talak sunni.

### 4) Talak Bid'i

Dalam KHI pasal 122 yang dimaksud Talak Bid'i adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid atau istri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut<sup>15</sup>.

---

<sup>13</sup> A. Sholihul, *Undang - Undang Perkawinan: dilengkapi Kompilasi Hukum Islam*, h. 139

<sup>14</sup> A. Sholihul, *Undang - Undang Perkawinan: dilengkapi Kompilasi Hukum Islam*, h. 139

<sup>15</sup> A. Sholihul, *Undang-Undang Perkawinan: dilengkapi Kompilasi Hukum Islam*, h. 139

## 2) Khulu'

### a. Definisi Khulu'

Khuluk adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau 'iwadl kepada dan atas persetujuan suaminya<sup>16</sup>. Syari'ah telah memberikan hak perceraian kepada laki-laki yang tidak menyukai istrinya dan merasa bahwa ia tidak lagi dapat hidup bersamanya. Begitupula, syari'ah telah memberikan hak kepada istri untuk meminta cerai dari suami yang tidak disukainya. Allah memberikan jalan bagi istri yang sudah lagi tidak mau bersama suaminya lagi karena sesuatu hal dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 229.

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكِ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَنٍ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا  
ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ  
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ  
اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

Terjemahnya:

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang Telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah

<sup>16</sup> A. Sholihul, *Undang-Undang Perkawinan: dilengkapi Kompilasi Hukum Islam*, h. 92



hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim<sup>17</sup>.

Sebagai dasar Al - Hadis, dari Ibnu Abbas Radhiyallahu anhuma, istri Tsabit bin Qais mendatangi Rasulullah Saw. Seraya berkata ”Wahai Rasulullah, sesungguhnya Tsabit bin Qais tidak punya cacat dalm hal akhlak dan agama. Akan tetapi aku takut kufur dalam islam.”Rasulullah berkata,”Apakah kamu mau mengembalikan kebunmu (Pemberian) kepadanya?” perempuan tersebut berkata,”Ya”. Maka Rasulullah berkata,”terimalah kebunmu ini dan talaklah ia dengan talak satu”. (HR. Al-Bukhari No. 5273). Al-Qur'an dan Hadis diatas menjadi dasar diperbolehkannya Khulu'.

Para fuqaha berselisih pendapat mengenai apakah khulu' itu disyariatkan istri harus nuzyuz ataukah tidak. Menurut golongan zhahiria dan Ibnul Mudzir berpendapat bahwa untuk syahnya khulu' haruslah karena istri nuzyuz, berdasarkan kisah dalam hadis tersebut bahwa istri meminta cerai berarti dalam keadaan nuzyuz. Sedangkan As-syafi'I, Abu Hanifah, dan ahli ilmu berpendapat bahwa khulu' itu sah dilakukan meski istri tidak dalam keadaan nuzyuz, dan khulu' itu sah dengan saling kerelaan antara suami dan istri kendati keduanya dalam keadaan biasa dan baik - baik saja.

Ada beberapa hal yang dapat menjadi landasan istri meminta khulu' kepada suaminya<sup>18</sup> diantaranya:

---

<sup>17</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.36.

- a. Khulu' wajib dilakukan ketika permintaan istri karena suami tidak mau memberi nafkah atau menggauli istri sedangkan istri menjadi tersiksa.
- b. Bila istri membenci suaminya, baik karena hubungan keduanya tidak harmonis, akhlak suami jelek, atau istri takut berdosa dengan meninggalkan haknya, maka dalam keadaan seperti ini suami disunnahkan menerima pengajuan Khulu' dari istri.
- c. Bila istri membenci perangai suami karena meninggalkan perintah agama, seperti meninggalkan sholat, tidak menjaga harga diri, dan lain sebagainya. Bila suami tidak dinasehati, maka istri wajib meminta pisah.
- d. Bila suami melakukan perbuatan haram, sedang suami tidak memaksanya melakukan perbuatan haram tersebut maka tidak perlu meminta khulu'.

Perbedaan khulu' dan talak dalam hal waktu dijatuhkannya, ialah bahwa khulu' boleh terjadi di waktu mana tidak terjadi talak, sehingga talak boleh terjadi ketika istri sedang haid, nifas, atau dalam keadaan suci yang telah dikumpulkan. Bila suami melakukan khulu' terhadap istrinya, maka dengan khulu' itu bekas istri menguasai dirinya secara penuh, suami tidak berhak merujuknya kembali, segala urusan bekas istri berada ditangannya sendiri, sebab ia telah menyerahkan sejumlah harta kepada suami guna melepas dirinya sendiri<sup>19</sup>.

---

<sup>18</sup> Tuwaijiri, Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah, *Ensiklopedi Islam Al-Kamil*, ed. Budiasyah, h. 1063-1064.

<sup>19</sup> Direktorat Jendral Pembinaan kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqh Jilid II*, h. 255.

Adapun status perceraian karena khulu' adalah sebagai talak Ba'in bagi istri sehingga meski kemudian suami bersedia mengembalikan iwad (tebusan) yang telah diberikan kepadanya namun suami tidak berhak merujukinya kembali meskipun bekas istri mau menerima kembali iwadnya. Kecuali jika bekas suami mengadakan akad baru dengan rukun dan syarat lazimnya akad nikah.

### 3) Li'an

#### a. Definisi Li'an

Menurut istilah dalam hukum islam, Li'an adalah sumpah yang diucapkan oleh suami ketika ia menuduh istrinya berbuat zina dengan empat kali kesaksian bahwa ia termasuk orang yang benar dalam tuduhannya, kemudian pada sumpah kesaksian kelimannya disertai pernyataan bahwa ia bersedia menerima laknat Allah jika ia berdusta dalam tuduhannya itu<sup>20</sup>.

Sedangkan menurut KHI pasal 126 Li'an terjadi karena suami menuduh istri berzina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari istrinya, sedangkan istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut.<sup>21</sup> Dengan terjadinya Li'an maka perkawinan antara suami dan istri putus untuk selamanya namun pelaksanaannya sah ketika dilakukan dihadapan sidang Pengadilan

---

<sup>20</sup> Direktorat Jendral Pembinaan kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqh Jilid II*, h. 264.

<sup>21</sup> A. Sholihul, *Undang - Undang Perkawinan: dilengkapi Kompilasi Hukum Islam*, h.140

Agama<sup>22</sup>. Selain putus selama-lamanya, Li'an juga menggugurkan beberapa hukum atau dengan kata lain menimbulkan hukum pasca terjadinya Li'an<sup>23</sup>, yakni:

- 1) Gugurnya hukuman dera bagi suami
- 2) Gugurnya hukuman rajam bagi istri
- 3) Suami istri dipisah (dicerai)
- 4) Pengharaman keduanya berlaku selama-lamanya
- 5) Peniadaan anak dari suami bila ada anak dan anak diberikan kepada istri
- 6) Istri yang dicerai dengan li'an pada masa iddahnya tidak berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal.

#### b. Dasar Hukum

Dasar hukum pengaturan Li'an bagi suami yang menuduh istrinya berbuat zina ialah firman Allah Q.S. An Nur/24: 6-7.

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَدُوا أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ  
شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٦﴾ وَالْخَمْسَةَ أَنْ لَعْنَتُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ  
الْكَاذِبِينَ ﴿٧﴾

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, Maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, Sesungguhnya dia adalah

<sup>22</sup> Pasal 125 dan 128 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

<sup>23</sup> Tuwaijiri, Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah, *Ensiklopedi Islam Al-Kamil*, ed. Budiasyah, h. 1070.

termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa la'nat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta<sup>24</sup>.

Terhadap tuduhan suami, istri dapat menyangkalnya dengan sumpah kesaksian sebanyak empat kali bahwa suami berdusta dalam tuduhannya, dan pada sumpah kelima disertai pernyataan bahwa ia bersedia menerima murka dari Allah jika suaminya benar dalam tuduhannya. Terdapat pada Q.S. An Nur/24: 8-9.

وَيَذَرُوهَا عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَذِبِينَ  
وَالْخَمْسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ

Terjemahnya:

Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah Sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar<sup>25</sup>.

#### c. Tata cara Li'an

Adapun tata cara li'an yang diatur sesuai dengan KHI pasal 127 sebagai berikut:

- 1) Suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan atau pengingkaran anak tersebut diikuti sumpah kelima dengan kata - kata laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dusta.

<sup>24</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 350.

<sup>25</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 350.

- 2) Istri menolak tuduhan tersebut dan atau pengingkaran tersebut dengan sumpah empat kali dengan kata-kata tuduhan dan atau pengingkaran tersebut tidak benar, diikuti sumpah kelima dengan kata-kata murka Allah atas dirinya, tuduhan dan atau pengingkaran tersebut tidak benar.
- 3) Tata cara pada huruf a dan huruf b tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan
- 4) Apabila tata cara huruf a tidak diikuti dengan tata cara huruf b maka dianggap tidak terjadi Li'an.

#### 4) Zhihar

##### a. Definisi Zhihar

Menurut bahasa arab, kata Zhihar terambil dari kata zhahrun yang bermakna punggung. Dalam kaitannya dengan hubungan suami istri. Zhihar adalah ucapan suami kepada istrinya yang berisi menyerupakan punggung istri dengan punggung ibu suami seperti ucapan suami kepada istrinya: “Engkau bagiku adalah seperti punggung ibuku<sup>26</sup>”. Ucapan dzihar di masa jahiliyah dipergunakan oleh suami yang bermaksud mengharamkan menyetubuhi istri dan berakibat haramnya istri itu bagi suami dan laki-laki selain saya, untuk selama-lamanya. Ketika islam datang, islam menyelamatkan kaum perempuan dari kedzaliman seperti ini, dan menjelaskan bahwa dzihar adalah perkataan mungkar dan dosa karena berada bukan pada tempatnya. Sesungguhnya istri bukan ibu, sehingga istri menjadi haram seperti

---

<sup>26</sup> Direktorat Jendral Pembinaan kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqh Jilid II*, h. 256

kedudukan ibu (haram dinikahi). Islam membatalkan hukum ini dan menjadikan zihar haram bagi perempuan sehingga suami yang mengucapkannya terkena kafarat dzihar<sup>27</sup>. Suami pun yang mendzihar istrinya haram menggauli istrinya sebelum membayar kafarat dzihar.

#### b. Dasar Hukum

Sebagai dasar hukum adanya pengaturan zihar ialah firman Allah Swt Q.S.

Al Mujaadilah/58:1-4

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَدِّلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ۖ  
 إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿١﴾ الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ ۚ إِنَّ  
 أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ ۚ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ  
 لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ﴿٢﴾ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ مِنْ  
 قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا ۚ ذَٰلِكُمْ تُوَعُّظُونَ بِهِ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٣﴾ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ  
 فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا ۚ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ۚ  
 ذَٰلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٤﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah Telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya, dan mengadukan (halnya) kepada Allah. dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Orang-orang yang menzihar

<sup>27</sup> At-Tuwaijiri, Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah, *Ensiklopedi Islam Al - Kamil*, ed. Budiasyah, h. 1066.



isterinya di antara kamu, (menganggap isterinya sebagai ibunya, padahal) tiadalah isteri mereka itu ibu mereka. ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. dan Sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan mungkar dan dusta. dan Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Orang-orang yang menzhihar isteri mereka, Kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, Maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barangsiapa yang tidak mendapatkan (budak), Maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak Kuasa (wajiblah atasnya) memberi makan enam puluh orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. dan Itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang kafir ada siksaan yang sangat pedih<sup>28</sup>.

Sebab turunnya ayat Ini ialah berhubungan dengan persoalan seorang wanita bernama Khaulah binti Tsa'labah yang Telah dizhihar oleh suaminya Aus ibn Shamit, yaitu dengan mengatakan kepada isterinya: Kamu bagiku seperti punggung ibuku dengan maksud dia tidak boleh lagi menggauli isterinya, sebagaimana ia tidak boleh menggauli ibunya. menurut adat Jahiliyah kalimat zhihar seperti itu sudah sama dengan mentalak isteri. Maka Khaulah mengadukan hal itu kepada Rasulullah s.a.w. Rasulullah menjawab, bahwa dalam hal Ini belum ada Keputusan dari Allah. dan pada riwayat yang lain Rasulullah mengatakan: Engkau Telah diharamkan bersetubuh dengan dia. lalu Khaulah berkata: Suamiku belum menyebutkan kata-kata talak Kemudian Khaulah berulang kali mendesak Rasulullah supaya menetapkan

---

<sup>28</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 542.

suatu keputusan dalam hal ini, sehingga Kemudian turunlah ayat ini dan ayat-ayat berikutnya<sup>29</sup>.

c. Status hukum jika terjadi zhihar

Apabila suami menyatakan dzihar kepada istrinya maka berlakulah ketentuan hukum sebagai berikut.

- 1) Bila suami menyesali ucapannya dan berpendapat bahwa hidup kembali dengan istrinya itu akan mendatangkan manfaat serta akan terbina hubungan normal dan baik, maka hendaknya suami mencabut kembali zhiharnya itu seraya mengembalikan istrinya kepangkuaanya, saling memaafkan atas apa yang telah terjadi, saling berjanji akan memperbaiki hubungannya. Namun sebelum mengumpuli kembali istrinya suami terlebih dahulu membayar kafarat zhihar. Adapun kafarat yang harus dibayar terdapat pada Q.S. Al Mujadillah/58: 3-5 dan sabda Rasulullah SAW.

وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ قَالَ: ( دَخَلَ رَمَضَانُ، فَخِيفْتُ أَنْ أُصِيبَ إِمْرَأَتِي، فَظَاهَرْتُ مِنْهَا، فَانْكَشَفَ لِي مِنْهَا شَيْءٌ لَيْلَةً، فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرِّزْ رَقَبَةً قُلْتُ: مَا أَمْلِكُ إِلَّا رَقَبَتِي. قَالَ: فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، قُلْتُ: وَهَلْ أَصَبْتُ الَّذِي أَصَبْتُ إِلَّا مِنَ الصَّيَامِ؟ قَالَ: أَطْعِمَ عِرْقًا مِنْ تَمَرٍ بَيْنَ سَتَيْنِ مُسْكِينًا ) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ الْجَارُودِ

---

<sup>29</sup> Direktorat Jendral Pembinaan kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqh Jilid II*, h. 258

Artinya:

Salamah Ibnu Shahr Radliyallaahu 'anhu berkata: Bulan Ramadhan datang dan aku takut berkumpul dengan istriku. Maka aku mengucapkan dhihar kepadanya. Namun tersingkaplah bagian tubuhnya di depanku pada suatu malam, lalu aku berkumpul dengannya. Maka bersabdalah Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam kepadaku: "Merdekakanlah seorang budak." Aku berkata: Aku tidak memiliki kecuali seorang budakku. Beliau bersabda: "Berpuasalah dua bulan berturut-turut." Aku berkata: Bukankah aku terkena denda ini hanyalah karena berpuasa?. Beliau bersabda: "Berilah makan satu faraq (3 sho' = 7 kg) kurma kepada enam puluh orang miskin. Riwayat Ahmad dan Imam Empat kecuali Nasa'i. Hadis shahih menurut Ibnu Khuzaimah dan Ibnu al-Jarud<sup>30</sup>.

- 2) Bila suami berpendapat, bahwa memperbaiki kembali hubungan suami istri tidak akan memungkinkan dan menurut pertimbangannya bahwa bercerai itulah jalan yang paling baik, maka hendaklah suami menjatuhkan thalaq kepada istrinya, agar tidak menyiksa istri. Kedudukan perceraian dalam kasus dzihar adalah termasuk ba'in artinya bekas suami tidak berhak merujuk kembali istrinya kecuali dengan akad yang baru.
- 3) Apabila suami sudah menzhihar istri, kemudian istri merasa tidak aman dari kelakuan suaminya, maka istri dibolehkan atau hendaknya mengadukan kepada hakim agar dipisahkan untuk sementara waktu, sembari menunggu keputusan penyelesaian kasus zhiharnya begitupula sebaliknya jika istri merasa aman dari kelakuan suaminya, maka tidak ada halangan istri untuk tetap tinggal bersama suaminya.

---

<sup>30</sup>Dani Hidayat, *Bulughul Mahram Min Adillatil Ahkam Versi 2.0*. (4 Juli 2008), Pustaka\_alhidayah@yahoo.co.id (23 Maret 2014).

- 4) Jika suami tidak mencabut zhiharnya, maka setelah 4 bulan atau 120 hari semenjak zhiharnya diucapkan maka hakim menceraikan keduanya dan status cerainya adalah thalaq ba'in.

## 5) Il'a

### a. Definisi Il'a

Kata Il'a menurut bahasa merupakan masdar dari kata Aalaa-Yuulii - Illaa'an, yang berarti sumpah. Menurut hukum islam, Il'a adalah sumpah suami dengan menyebut nama Allah atau sifat-Nya yang tertuju kepada istrinya untuk tidak mendekati istrinya, baik secara mutlak maupun dibatasi dengan ucapan selamanya atau dibatasi empat bulan atau lebih<sup>31</sup>.

Il'a menjadi pelajaran bagi istri yang bermaksiat dan durhaka kepada suaminya. Il'a hanya dapat dilakukan selama empat bulan atau lebih, bila melebihi maka hukumnya haram dan merupakan bentuk kedzaliman karena il'a merupakan sumpah yang meninggalkan kewajiban atasnya. Adapun proses il'a dapat digambarkan misalnya seorang suami tidak mendekati (menggauli) istrinya selamanya, atau lebih dari empat bulan maka telah jatuh Il'a. Bila ia menggauli istrinya setelah empat bulan, gugurlah Il'a. Sedangkan suami wajib membayar kafarat sumpah dengan cara memberi makan sepuluh orang miskin atau pakaian mereka, atau memerdekakan budak tapi bila tidak mampu hendaknya berpuasa selama tiga hari. Hal ini diatur dalam firman Allah SWT, Q.S. Al - Maidah/5: 89.

---

<sup>31</sup> Direktorat Jendral Pembinaan kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqh Jilid II*, h. 261.

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانَ  
فَكَفَرْتُمْ بِهِ إِطْعَامَ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ  
رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَرَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا  
أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٢٤﴾

Terjemahnya:

Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, Maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi Pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, Maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya)<sup>32</sup>.

Bila empat bulan telah berlalu dan suami tidak menggaulinya, maka istri hendaknya minta untuk digauli, bila suami tidak menggaulinya maka baginya kafarat sumpah. Jika suami enggan, istri meminta cerai. Bila suami pun enggan menceraikannya maka hakim dapat menjatuhkan thalaq satu untuk mencegah bahaya bagi istri yang dijatuhi Il'a.

<sup>32</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 122.

b. Dasar hukum

Dasar hukum Il'a termaktub dalam firman Allah Q.S. AlBaqarah/2: 226 -227.

لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ۖ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٢٦﴾ وَإِن عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Terjemahnya:

Kepada orang-orang yang meng-ilaa' isterinyadiberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui<sup>33</sup>.



<sup>33</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 36.



### **BAB III**

#### **METODOLOGI PENELITIAN**

##### ***A. Jenis dan Lokasi Penelitian***

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis Penelitian Deskriptif, yaitu penelitian yang bermaksud membuat pemeriaan (penyandaraan) secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu<sup>1</sup>, dengan menyajikan data-data perceraian dan penyebabnya, tahun 2011-2013 di tiga lokasi penelitian, yakni Pengadilan Agama Makassar, Maros dan Sungguminasa.

##### ***B. Pendekatan Penelitian***

1. Pendekatan Yuridis, Pendekatan yuridis yaitu suatu metode atau cara yang digunakan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku yang memiliki korelasi dengan masalah yang akan diteliti. Aturan atau undang-undang yang digunakan dalam penelitian ini, yakni:
  - a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
  - b. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
  - c. Kompilasi Hukum Islam (KHI)
  - d. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan undang-undang no. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama
  - e. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

---

<sup>1</sup> Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metode Penelitian Sosial*. (Cet. V; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), h. 4



2. Pendekatan Syar'I, yaitu pendekatan terhadap Hukum Islam yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti. Sumber yang digunakan adalah Al-Qur'an dan hadis.

### ***C. Populasi dan Sampel***

#### **1. Populasi**

Populasi ialah semua nilai baik hasil perhitungan maupun pengukuran, baik kuantitatif maupun kualitatif, daripada karakteristik tertentu mengenai sekelompok objek yang lengkap dan jelas<sup>2</sup>. Populasi dalam penelitian ini adalah semua kasus cerai yang terjadi pada tahun 2011-2013 di PA. Makassar, PA. Maros, dan PA. Sungguminasa.

#### **2. Sampel**

Sampel (contoh) ialah sebagian anggota populasi yang diambil dengan menggunakan teknik tertentu yang disebut dengan teknik sampling<sup>3</sup>. Adapun sampel dari penelitian ini adalah perceraian yang ada pada Pengadilan Agama Makassar, Maros, dan Sungguminasa rentan waktu 2011-2013 yang sudah putus atau telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan cara pengambilan sampel, yaitu teknik sampling kluster (*Cluster Sampling*) adalah teknik ini digunakan apabila populasi tersebar dalam beberapa daerah, provinsi, kabupaten,

---

<sup>2</sup> Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metode Penelitian Sosial.*, h. 43.

<sup>3</sup> Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metode Penelitian Sosial.*, h. 44.

kecamatan dan seterusnya<sup>4</sup>. Dalam hal ini, lokasi penelitian terletak di Kota Makassar, Kabupaten Maros, dan Kabupaten Sungguminasa.

#### ***D. Metode Pengumpulan Data***

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode *Field Research* atau penelitian lapangan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti<sup>5</sup>. Observasi yang dilakukan dengan cara observasi nonpartisipan yakni peneliti tidak terlibat langsung dalam objek penelitian. Observasi yang dilakukan dengan cara mengamati kemudian menyimpulkan dari data yang diperoleh yaitu data-data perceraian yang ada di Pengadilan Agama Makassar, Maros, dan Sungguminasa pada tahun 2011-2013. Sedangkan wawancara adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung<sup>6</sup>. Dengan meminta keterangan atau informasi mengenai penyebab-penyebab perceraian pada 3 (tiga) Pengadilan Agama tersebut, adapun yang peneliti wawancarai adalah Dr. Muctaruddin Bachrum, S.Hi, M.Hi (hakim) dan Tadjuddin Maslan S.H (wakil panitera) di Pengadilan Agama Sungguminasa, Kab. Gowa. Kemudian dokumentasi dengan cara mengambil gambar ataupun mengumpulkan surat-surat yang berkaitan langsung dengan penelitian.

---

<sup>4</sup> Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, h. 46.

<sup>5</sup> Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, h. 54.

<sup>6</sup> Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, h. 57.

### ***E. Instrumen Pengumpulan Data***

Adapun alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini, yakni Panduan observasi dengan *Rating Scale*, yaitu instrumen untuk mencatat gejala menurut penyebab dominannya dan *Checklist*, yaitu suatu daftar yang berisi nama-nama responden dan faktor -faktor yang hendak diamati dan pedoman wawancara yakni alat yang digunakan dalam wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari narasumber yang berupa pertanyaan.

### ***F. Metode Pengolahan dan Analisis Data***

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengolahan data kuantitatif dengan cara:

1. *Editing*, yaitu proses memeriksa data yang sudah terkumpul meliputi kelengkapan isian, tulisan, kejelasan jawaban, relevansi jawaban, keseragaman satuan yang digunakan, dan lain-lain.
2. Tabulasi data, yaitu penyajian data dalam bentuk tabel atau daftar untuk memudahkan pengamatan dan evaluasi.

Adapun analisis data dengan cara analisis kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka dan pengolahannya menggunakan rumus-rumus statistik.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### *A. Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Pada Pengadilan Agama Makassar, Maros, Dan Sungguminasa Kurun Waktu 2011-2013*

Faktor penyebab terjadinya perceraian di tiga Pengadilan Agama rentang waktu 2011-2013.

Tabel 1  
Presentase penyebab perceraian di PA. Makassar, PA. Maros, dan PA. Sungguminasa

No.	Penyebab	Makassar			Maros			Sungguminasa		
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
1	Moral	13%	15%	24%	11%	3%	2%	20%	12%	3%
2	Meninggalkan Kewajiban	30%	23%	20%	11%	7%	6%	45%	47%	27%
3	Kawin di umur	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
4	Menyakiti Jasmani	2%	1%	1%	2%	1%	1%	14%	7%	2%
5	Dihukum	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.20%	0%	0.50%
6	Cacat Biologis	0.30%	0%	0%	0.30%	0%	0%	0.30%	0%	0%
7	Berselisih	43%	49%	41%	77%	89%	91%	30%	38%	68%
8	Lain – lain	0.70%	0%	1.80%	0.30%	0%	1%	0%	0%	0%
<b>Jumlah Perkara</b>		<b>1455</b>	<b>1321</b>	<b>1460</b>	<b>352</b>	<b>403</b>	<b>397</b>	<b>484</b>	<b>568</b>	<b>571</b>

Sumber data: Data Perceraian pada Pengadilan Agama Makassar, Maros, dan Sungguminasa

Tabel 2  
Penyebab Perceraian dalam Bentuk Jumlah Kasus

No.	Penyebab	Makassar			Maros			Sungguminasa		
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
1	Moral	200	195	353	35	11	6	98	68	19
2	Meninggalkan Kewajiban	439	302	296	29	27	24	218	239	157
3	Kawin di umur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Menyakiti Jasmani	178	170	178	8	3	2	19	38	6
5	Dihukum	0	0	0		0	0	1		0
6	Cacat Biologis	9	0	4	1	0	0	0	1	0
7	Berselisih	628	654	604	252	362	363	148	219	389
8	Lain-lain	1	0	27	1	0	2	0	0	0
<b>Jumlah Perkara</b>		<b>1455</b>	<b>1321</b>	<b>1460</b>	<b>352</b>	<b>403</b>	<b>397</b>	<b>484</b>	<b>568</b>	<b>571</b>

Sumber data: Data Perceraian pada Pengadilan Agama Makassar, Maros, dan Sungguminasa

Penyebab perceraian di tiga pengadilan rentan waktu 2011-2013 dalam mengkategorikan penyebab perceraian sama. Berikut diuraikan penjelasan mengenai penyebab perceraian ketiga Pengadilan Agama tersebut.

#### 1. Moral

##### a. Poligami tidak Sehat

Poligami tidak sehat dapat dipahami bahwa poligami ini dilakukan menyalahi aturan-aturan yang ada dalam perundangan-undangan seperti tidak terpenuhinya syarat-syarat seorang itu dapat berpoligami seperti poligami tanpa seizin istri. Para pelaku pologami melakukan poligami tidak sehat ini biasanya dengan cara memalsukan identitas mereka. Hal ini patut diwaspadai oleh para penghulu agar terlebih dahulu mengecek dan memastikan identitas para pihak terlebih dahulu

sebelum menikahkan para pihak. Islam sendiri tidak menutup rapat ataupun membuka lebar jalan poligami. Di Indonesia aturan Poligami dimuat dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 tahun 1975 Bab VII pasal 41<sup>1</sup>:

1. Ada tidaknya alasan yang memungkinkan seseorang suami kawin :
  - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
  - b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
  - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.
2. Adanya persetujuan istri baik lisan maupun tulisan yang diucapkan di depan sidang Pengadilan.
3. Adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya.
4. Adanya jaminan bagi suami bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur mengenai batasan poligami termuat dalam Bab IX pasal 55 ayat (1), (2), dan (3).

#### b. Krisis Akhlak

Akhlak atau tingkah laku manusia relatif beragam sehingga dalam ekspresinya manusia selalu diukur dari perilaku baik atau buruk. Dalam al-Qur'an terdapat isyarat yang menghiiasi diri manusia, antara lain Q.S. Al Lail/92:4, Al-

---

<sup>1</sup> A. Sholihul, *Undang-Undang Perkawinan: dilengkapi Kompilasi Hukum Islam*, h. 58-59.

Balad/90:10, Asy-Syam/91:7-8, dan Thaha/20:121. Dalam konteks pembinaan keluarga yang harmonis, maka akhlak yang baik secara kongrit berpengaruh terhadap perilaku manusia dan terpancar dari cahaya jiwanya yang penuh kesadaran tentang fungsi dan tanggung jawabnya. Akhlakul karimah relatif sangat berpengaruh dalam membina rumah tangga yang harmonis (Sakinah, mawaddah, warahmah) sejalan dengan tujuan dalam hakikat perkawinan. Drs. H. A. Syamsul Alam, S.H., M.H., dalam bukunya Reformasi Peradilan Agama di Indonesia menunjukkan bahwa dalam masyarakat seorang calon suami ketika melamar selalu didominasi oleh pertanyaan, apa pekerjaan dia, tetapi bukan melihat kepribadiaannya dari aspek akhlak dan kedewasaan serta kematangan dalam usia. Akhlak selalu disubordinasikan oleh penilaian materil dan *social Standing*<sup>2</sup>, kedua faktor inilah yang semestinya menempati posisi teratas dalam pertimbangan memilih calon suami untuk orang tua calon istri.

Dalam hal krisis akhlak yang agak banyak terjadi dan merupakan penyebab perceraian harus dapat dihindari. Apalagi akhlak mulia relatif mendorong manusia menumbuhkan rasa cinta dan membangkitkan semangat membina kebersamaan atas dasar mawadah warahmah. Hanya dengan akhlak yang baik dari pasangan suami istri akan menunjang keselarasan dalam kehidupan yang tidak hanya terbatas pada intern keluarga, akan tetapi terpancar keluar pada lingkungan sosialnya.

---

<sup>2</sup> Andi Syamsul Alam, *Reformasi Peradilan Agama di Indonesia*, h. 67



### c. Cemburu

Cemburu dalam pergaulan suami istri adalah ketidakpercayaan atau kecurigaan suami ataupun istri terhadap pergaulan keseharian mereka. Terkadang cemburu muncul dikarenakan perilaku yang dianggap suami atau istri berlebihan ketika dalam pergaulannya baik teman-teman ataupun keluarganya. Contohnya, bila sangat istri sering berhubungan akrab bersama seorang laki-laki yang menurut suaminya berlebihan karena istrinya sering jalan bersama laki-laki lain, Begitupula sebaliknya.

Cemburu merupakan tanda suami dan istri sangat menyayangi dan mencintai pasangannya, cemburu memang perlu, namun yang harus dihindari adalah cemburu buta. Cemburu buta ini adalah cemburu tanpa dasar yang jelas dan rasional. Contohnya, ketika suami bekerja sebagai juru panggil atau jurusita, saat mengantar surat panggilan suami bertemu dengan banyak perempuan, istri pun cemburu dan mencurigai suami melakukan perselingkuhan. Namun, suami pada dasarnya bekerja untuk keperluan nafkah, bukan untuk berselingkuh.

## 2. Meninggalkan kewajiban K A S S A R

### a. Kawin paksa

Ketika berbicara kawin paksa yang ada dibenak kita adalah roman tentang Siti Nurbaya, yang dipaksa menikah dengan lelaki tua karena jerat utang yang melilit keluarganya. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa kekiniaan “kawin paksa” masih terjadi. Entah dialami oleh mereka yang telah berpendidikan dan tinggal diperkotaan

maupun pinggiran. Namun, kadar kerterpaksaan setiap orang berbeda. Pada dasarnya perkawinan merupakan kesepakatan dua hati untuk menyatu dalam satu ikatan keluarga yang didasarkan pada kasih<sup>3</sup>. Ada beberapa alasan mengapa seorang terpaksa kawin atau menikah:

- 1) Dijodohkan orang tua. Biasanya orang tua berharap anaknya dapat jodoh yang sederajat (sekufu) ataupun lebih tinggi.
- 2) Dipaksa orang tua karena orang tua terlilit utang piutang. Ini bukan hanya dialami oleh kaum perempuan tetapi juga dialami oleh kaum laki - laki yang dipaksa untuk menikahi perempuan yang hamil tanpa suami.
- 3) Tertangkap tangan oleh masyarakat dan tokoh masyarakat sedang berduaan di tempat yang sepi.
- 4) Dipaksa oleh pasangan
- 5) Takut disebut perjaka tua atau perawan tua.
- 6) Kebablasan dalam pergaulan bebas sehingga hamil di luar nikah.
- 7) Korban pelecehan atau perkosaan.

#### b. Ekonomi

Perceraian karena faktor ekonomi merupakan hal yang klasik. Ekonomi merupakan penopang kegiatan keseharian. Tanpa pengaturan perekonomian keluarga dengan manajemen yang baik, maka keluarga akan rentan goyah. Permasalahan ekonomi merupakan permasalahan sensitive karena menyangkut

---

<sup>3</sup> Mas Ukik, Kawin paksa. Blog mas ukik. [Http://kompasiana.com/post/read/624781/3/kawin-paksa.html](http://kompasiana.com/post/read/624781/3/kawin-paksa.html). (27 Juni 2014).

kehidupan dan kelangsungan hidup antara suami dan istri. Istri pun dituntut untuk dapat mengatur keuangan keluarga dengan bijak, menggunakan seperlunya. Ketika keadaan ekonomi yang morat marit, suami yang tak mampu menafkahi istrinya, dan penghasilan yang pas-pasaan akan berdampak pada kehidupan keluarga yang makan tidak makan hingga bermuara ke perpisahan keluarga karena istri yang sudah tidak tahan dengan kondisi yang dialami. Namun hal ini relatif tergantung istri dikarenakan istri dapat bersabar menghadapi kondisi keuangan yang morat marit ataupun lainnya dan walaupun keuangan yang minim namun istri dapat mengelolah keuangan dengan baik.

Adapula alasan ekonomi dikarenakan suami yang mengatur keperluan keluarga padahal seharusnya istrilah yang berhak mengatur keperluan keluarga<sup>4</sup>, suami hanya mengatur atau ikut mempertimbangkan ketika ada sesuatu ingin dibeli oleh istri. Dalam bahasa Makassar suami seperti ini disebut *Pamppidokang*. Faktor ekonomi ini menjadi kasus paling menonjol setelah perselingkuhan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan faktor gengsi<sup>5</sup>.

---

<sup>4</sup> Lihat KHI pasal 83 ayat (2) istri berkewajiban mengatur dan menyelenggarakan keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

<sup>5</sup> “Tidak Orgasme Pemicu Perceraian di Makassar”(Liputan). *Tribun Timur*, 2 November 2013.

c. Tidak ada tanggung jawab

Dalam Bab XII KHI tertuang apa yang menjadi hak dan kewajiban baik istri maupun suami, pasal 77-81 dan 83-84. Sebagai seorang suami menjadi kepala rumah tangga dan pencari nafkah adalah kewajiban suami, selain nafkah lahir suami pula dituntut untuk menjamin nafkah batin. Tanpa adanya jaminan nafkah yang layak maka kehidupan keluarga akan tidak berjalan sebagaimana mestinya karena pemberian nafkah merupakan pondasi dalam keluarga dan keberlangsungan hidup keluarga akan terganggu. Ketidakmampuan suami dalam menjamin nafkah baik lahir dan batin mendorong istri dapat mengajukan perceraian. Bukan hanya dari pihak suami, istri pun dituntut untuk mengelolah dengan baik keluarganya, berbakti, mengatur keuangan, menjaga kehormatan suami dll sebagainya. Kesadaran kedua belah pihak akan tanggung jawab masing-masing akan mendorong terciptanya tujuan pernikahan yang hakiki (sakinah, mawaddah, warahmah).

3. Kawin di bawah Umur

Kawin di bawah umur atau biasa disebut Dispensasi Nikah (DN) diatur dalam UU. No. 1 tahun 1974 tentang pernikahan pasal 7, dispensasi nikah adalah permohonan dispensasi bagi calon mempelai yang belum memenuhi batasan usia minimal pernikahan, yakni kurang dari 19 tahun bagi laki-laki dan kurang dari 16 tahun untuk perempuan. Jika salah satu mempelai atau keduanya belum memenuhi batasan usia tersebut maka diwajibkan memiliki surat DN dari Pengadilan setempat. Di sebagian kota besar seperti Yogyakarta angka DN cukup tinggi, hal ini disebabkan

kahamilan di luar nikah<sup>6</sup>. Pengadilan agama acapkali dihadapkan pada pilihan sulit untuk mengabulkan permohonan DN. Pasalnya, disatu sisi melegalkan perzina, disatu sisi merugikan perempuan yang sudah hamil namun tidak mendapat DN.

Jika pun terjadi pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini maka harus diperhatikan beberapa hal. Drs. H. A. Syamsul Alam, S.H., M.H., menjelaskan dalam bukunya bahwa usia perkawinan harus diperhatikan bukan hanya aspek pemenuhan kebutuhan biologis saja, namun aspek psikologis juga harus menjadi perhatian utama. Jika seorang suami menikah di bawah umur 19 tahun, dapat dipastikan bahwa di usia ini adalah usia sekolah dan belum produktif<sup>7</sup>. Beliau menyarankan agar UU. Perkawinan pasal 7 ayat (2) perlu perubahan secara bertahap karena menurutnya pasal 7 ayat (2) tersebut terkesan ‘memudahkan’ proses perkawinan tanpa mempertimbangkan keharmonisan hidup keluarga. Jika orientasinya hanya dalam konteks pemenuhan nafkah batin (Hubungan seks), maka perkawinan menjadi hilang makna dan tidak sejalan dengan indikasi hukum perkawinan islam<sup>8</sup>. Lebih lanjut beliau menjelaskan mengenai usia ideal bagi pasangan suami istri yakni umur 25 tahun, alasannya adalah secara anatomis biologis, suami istri telah mempunyai

---

<sup>6</sup> Tribun timur news, “Permohonan Dispensasi kawin di bawah umur kian meningkat di Yogyakarta” (8 April 2013), [Http://tribuntimurnews.com/regional/2013/04/08/Permohonan-dispensasi-kawin-di-bawah-umur-kian-meningkat-di-Yogyakarta](http://tribuntimurnews.com/regional/2013/04/08/Permohonan-dispensasi-kawin-di-bawah-umur-kian-meningkat-di-Yogyakarta). (27 Juni 2014).

<sup>7</sup> Andi Syamsul Alam, *Reformasi Peradilan Agama di Indonesia*, h. 60.

<sup>8</sup> Andi Syamsul Alam, *Reformasi Peradilan Agama di Indonesia*, h. 61

kesiapan mengembangkan keturunan yang berkualitas, disamping tinjauan aspek sosio-psikologis diharapkan mendukung pembinaan keluargaan sakinah<sup>9</sup>.

#### 4. Menyakiti Jasmani

##### a. Kekejaman Jasmani

Penganiayaan seorang suami kepada istri ada dua macam, yakni penganiayaan secara fisik dan batin. Penganiayaan lahir misalnya menendang, menempeleng atau membanting. Sedangkan penganiayaan batin seperti mencerca, memaki dengan kata-kata kotor, atau mendiamkan tanpa mau sedikit pun menyapa dan berbicara sehingga istri merasa terasing dan tertekan dalam rumah tangganya sendiri. Selain itu, tidak mau menggauli istri dalam jangka lama yang seakan-akan tidak mempunyai suami termasuk dalam pengertian penganiayaan. Istri yang melakukan *nuzyuz* (tidak menaati perintah suami) terlebih dahulu oleh suami mengambil sikap-sikap berikut:

- 1) Menasehati
- 2) Membiarkan tidur sendiri di kamarnya
- 3) Memukul dengan pukulan ringan.

Firman Allah swt. Q.S. An-Nisa/4: 34 menegaskan pentingnya memperlakukan istri yang *nuzyuz* dengan baik dan tidak menyusahkannya.

---

<sup>9</sup> Andi Syamsul Alam, *Reformasi Peradilan Agama di Indonesia*, h. 69

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٢٨﴾

Terjemahnya:

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar<sup>10</sup>.

Tidak ada alasan bagi suami untuk berbuat aniaya terhadap istrinya. Karena Allah memberikan beberapa tahap untuk mendidik istri yang nuzyuz, walaupun istri di didik menggunakan kekerasan/pukulan fisik hendaknya tidak menyakitinya, tujuannya adalah mendidik dan tetap memperhatikan aspek-aspek fisik yang tidak boleh di sakiti. Inipun merupakan jalan terakhir bagi suami yang sudah berusaha menasehati dan pisah ranjang. Jika kemudian suami tanpa alasan yang jelas melakukan kekerasan fisik, maka istri dapat mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama guna menjaga keselamatan dan jaminan keamanan.

<sup>10</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 84.

### b. Kekejaman Mental

Pada dasarnya semua kekejaman dan penganiyaaan didasarkan pada kekerasan fisik, yakni kekejaman dan penganiyaan terhadap jasmaniah, sehingga dapat menimbulkan rasa sakit yang membahayakan atau melukai jasmani, pengertian ini bisa mencakup arti kekejaman mental berupa penghinaan dan penistaan yang melampaui batas sehingga dapat ditafsirkan sebagai kekejaman yang bisa membahayakan mental yang bersangkutan, dengan adanya tekanan batin yang berupa kecemburuan dan kedurhakaan salah satu pihak dalam perkawinan dapat dipakai alasan mental yang akan membawa kesudahan hidup dalam rumah tangga, sehingga tidak akan membawa kerukunan dan kebahagiaan<sup>11</sup>.

### 5. Dihukum

Berdasarkan PP. No. 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf c dijelaskan bahwa ketika Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung dapat menjadi alasan perceraian. Ketika salah satu di hukum ataupun dipenjara, praktis baik suami ataupun istri tidak dapat menjalankan kewajibannya. Namun walaupun di bawah 5 (lima) tahun sudah bisa mengajukan gugatan perceraian pada Pengadilan Agama.

### 6. Cacat biologis

---

<sup>11</sup>Zainuddin Ali, Alasan Perceraian dalam ilmu Hukum. *Blog Zainuddin Ali* (20 September 2009), [Http://zainuddin.blogspot.com/2009/09/20/Alasan-Perceraian-dalam-ilmu Hukum.html](http://zainuddin.blogspot.com/2009/09/20/Alasan-Perceraian-dalam-ilmu%20Hukum.html). (27 Juni 2014).



Pada diri laki-laki dan perempuan ditetapkan fitrah (naluri) untuk melaksanakan hubungan seksual. Fitrah yang dimaksud untuk menjalankan fungsi keturunan. Perkawinan yang dimaksud untuk memberikan jalan yang halal bagi terlaksananya keinginan berhubungan seksual seorang laki-laki dan perempuan dalam ikatan suami dan istri, sehingga terjadilah pengembangbiakan manusia secara bersih dan sehat.

Hubungan seksual hanya dapat berjalan dengan baik apabila pasangan suami istri dalam keadaan sehat. Suami tidak mengalami kelemahan syahwat sehingga dapat memenuhi kebutuhan seksual istrinya begitupula sebaliknya. Hubungan seksual sangat penting dalam melestarikan kemesraan perkawinan, karena hal tersebut dapat menciptakan suasana gembira, puas, dan sehat bagi kedua belah pihak.<sup>12</sup> Karena itu, jika terjadi gangguan pada salah satu pihak karena suami lemah syahwat atau istri mengalami frigiditas (tidak mudah terangsang). Maka islam memberikan solusi, berdasarkan sebuah hadis.

*“ Umar Bin Khattab berkata tentang suami yang lemah syahwat: ” Dia diberi tempo satu tahun. Jika dapat sembuh, (perkawinannya bisa diteruskan dan jika tidak, maka mereka diceraikan dan istrinya mendapatkan mahar serta dia harus beriiddah. (HR. Baihaqi).*

Para suami diberikan waktu selama 1 tahun untuk dapat sembuh. Jika tidak maka istri dapat mengajukan cerai dari suaminya. Sebaliknya istri pun diberikan

---

<sup>12</sup> M. Thalib, *15 Penyebab Perceraian Dan Penanggulangannya*, (Bandung: Irsyad Baitus Salam (IBS): 1997), h. 39

waktu yang sama untuk dapat sembuh. Seorang istri yang tidak lagi bersabar menghadapi suaminya yang mengalami lemah syahwat sedangkan dia belum pernah tersentuh sekalipun oleh suaminya, berhak melakukan tuntutan cerai lewat dari satu tahun dari masa penderitaan lemah syahwat suaminya, sedang suami tidak boleh mengambil mahar yang sudah diberikan oleh suaminya. Istri pun wajib beriddah sesuai dengan keadaannya.

Istri yang menuntut perceraian dari suaminya disebabkan lemah syahwat suaminya tidaklah dapat dikatakan sebagai orang yang tidak setia kepada suami ataupun durhaka karena tidak mau merawat suaminya dalam keadaan lemah syahwat. Sebab istri juga mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan seksual dari suaminya yang memberikan kepuasan dan kebahagiaan bagi dirinya. Karena itu, jika hak pelayanan semacam itu tidak diperoleh, maka yang bersangkutan berhak meminta cerai dan perceraian itu halal<sup>13</sup>. Dalam KHI pasal 116 huruf e, lemah syahwat dapat dijadikan sebagai alasan perceraian. Namun, ketentuan ini kurang jelas dan lugas. Sebab cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan suami atau istri tidak dapat menjalankan kewajibannya bisa bermacam-macam, tidak hanya lemah syahwat. Seorang suami yang lemah syahwat masih bisa mencari nafkah untuk istri dan anak-anaknya sehingga menelantarkan kebutuhan material istrinya. Begitupula seorang istri yang lemah syahwat, ia masih bisa melayani dan mengurus kepentingan

---

<sup>13</sup>M. Thalib, *15 Penyebab Perceraian Dan Penanggulangannya*, h. 47.

suaminya dalam urusan kebutuhan material dan moral. Bahkan mungkin ia dapat melayani kebutuhan seksualnya walaupun dilakukannya secara dingin<sup>14</sup>.

## 7. Terus menerus berselisih

### a. Politis

Perceraian karena politis saat ini sudah jarang terjadi. Perceraian jenis ini banyak terjadi pada tahun 90-an. Contoh perceraian karena alasan politis misalnya bapak istri maupun bapak suami merupakan kolega bisnis, baik bapak istri maupun suami sangat menginginkan agar bisnis mereka dapat berjalan terus dan maju untuk itu mereka mengawinkan atau menjodohkan mereka agar kedepannya bisnis yang mereka jalani akan sesuai dengan harapan mereka. Namun suami ataupun istri menolak perjodohan tersebut tapi karena alasan politis seperti diatas maka perkawinan berlangsung karena kepentingan salah satu pihak.

### b. Gangguan Pihak ketiga

Gangguan pihak ketiga dapat dipahami sebagai adanya orang yang mengganggu kehidupan rumah tangga atau dengan kata lain orang tersebut menjadi penyebab berpisahnya antara suami dan istri. Ada 2 (dua) pihak yang dikategorikan sebagai orang ketiga yakni Pertama, Wanita Idaman Lain (WIL) bagi suami, Pria Idaman Lain (PIL) bagi istri. Arti lainnya adalah salah satu pihak melakukan perselingkuhan dengan orang lain. Karena tidak adanya rasa kebahagiaan maupun

---

<sup>14</sup> M. Thalib, *15 Penyebab Perceraian Dan Penanggulangannya*, h. 50

ketenangan dalam rumah tangganya seperti cekcok dan pertengkaran yang *continue* berakibat pada salah satu pihak untuk melakukan perselingkuhan. Bukan hanya itu kepuasan batin pula yang mendorong seseorang untuk selingkuh, karena tidak puas dengan pelayanan suami ataupun istri, mendorong seseorang untuk mencari kepuasan batin di luar rumah.

Kedua, Mertua dari pihak suami ataupun pihak istri. Terkadang mertua ketika ada permasalahan antara suami dan istri, turut ikut campur dan bahkan terkadang mendorong salah satu pihak suami maupun istri untuk melakukan perceraian. Salah seorang hakim di Pengadilan Agama Sungguminasa, Dr. Sultan, S.Ag, S.H, M.H., bahwa kasus seperti ini banyak terjadi di pengadilan Agama sungguminasa. Beliau memberikan tips kelak ketika menikah tidak tinggal bersama mertua, kalau perlu tinggal jauh dari mertua, hal ini dikarenakan seperti yang dipaparkan diatas bahwa mertua terkadang turut campur dalam permasalahan yang seharusnya hanya diselesaikan oleh suami istri tersebut.

#### c. Tidak ada keharmonisan

Menjaga keharmonisan sering kali menjadi suatu masalah yang cukup sulit. Keretakan rumah tangga seringkali dialami oleh suami istri yang mulai tidak bisa saling mengerti satu sama lain. Ketika kedua belah pihak tidak bisa mengendalikan emosi masing-masing dalam menghadapi segala masalah yang ada, tidak jarang hubungan rumah tangga berakhir dengan perceraian. Banyak faktor yang memicu

berbagai masalah seperti yang peneliti kutip pada *website* wanita-tips<sup>15</sup>, dalam *web* tersebut menjelaskan faktor-faktor ketidakharmonisan dalam rumah tangga mulai dari faktor ekonomi, faktor ketidakcocokan prinsip, hingga faktor orang ketiga.

1. Faktor ekonomi, faktor yang paling *urgent* ini merupakan faktor yang sering memicu rusaknya keharmonisan rumah tangga. Ketika kebutuhan keuangan tidak terpenuhi, seringkali memicu amarah. Bagaimana tidak dalam kondisi terhimpit oleh kebutuhan ekonomi, secara manusiawi akan menyebabkan seseorang bingung dan tertekan. Belum lagi tuntutan untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya yang pastinya akan semakin memperberat beban ekonomi yang ditanggung. Jika seorang dalam kondisi seperti ini tidak bisa mengatur emosinya, maka bisa memicu pertengkaran yang sangat hebat bahkan mungkin akan kehilangan kendali.
2. Faktor yang bersifat Principal. Hal-hal yang sudah terkait dengan prinsip ini memang bisa dibilang cukup rumit. Masalahnya ketika suami atau istri berpegang teguh pada prinsip, maka akan sulit untuk mempengaruhinya. Bahkan dalam kehidupan nyata hal ini dibuktikan oleh sepasang suami istri yang akhirnya berpisah akibat perbedaan prinsip.

---

<sup>15</sup>Wanita tips.com. *Fakto-Faktor Penyebab Retaknya Keharmonisan Rumah Tangga*” (12 Maret 2013), [Http://wanita-tips.com/wanita-tips-faktor-faktor-penyebab-retaknya-keharmonisan-rumah-tangga.html](http://wanita-tips.com/wanita-tips-faktor-faktor-penyebab-retaknya-keharmonisan-rumah-tangga.html). (27 Juni 2014).

3. Faktor munculnya pihak ketiga dalam rumah tangga juga seringkali terjadi. Sebenarnya masalah yang satu ini tidak akan mudah terjadi selama suami istri mempunyai prinsip yang kuat untuk tidak terjerumus dalam hal ini.
4. Faktor kekerasan. Jika kedua belah pihak berusaha untuk menyelesaikan dengan baik-baik, kekerasan dalam rumah tangga tidak akan terjadi.
8. Lain-lain

Untuk penyebab lain-lain ini, jika penyebab perceraian tidak memenuhi kategori ketujuh sebab perceraian, maka ditempatkan di sebab lain-lain.

***B. Persamaan Dan Perbedaan Faktor Penyebab Perceraian Kurun Waktu 2011-2013 pada Pengadilan Agama Makassar, Maros, Dan Sungguminasa***

Adapun persamaan faktor penyebab perceraian di 3 (tiga) Pengadilan Agama ini adalah kategori penyebab yang sama poin 1-8, hal ini dikarenakan ketiga Pengadilan tersebut berpedoman pada KHI, Undang-Undang (UU) No. 7 tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP. No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai alasan perceraian. Dalam KHI pasal 116 alasan perceraian diuraikan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemandat, penjudi, dan lain-lain yang sukar disembuhkan. (Moral)
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. (Meninggalkan Kewajiban)

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.(di Hukum)
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.(Kekerasan Jasmani)
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.(Cacat Biologis)
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.(Perselisihan)
- g. Suami melanggar taklik talak
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Sedangkan dalam PP. No. 9 Tahun 1975 pasal 19<sup>16</sup> alasan perceraian dipaparkan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain-lain yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

---

<sup>16</sup> A. Sholihul, *Undang -Undang Perkawinan: dilengkapi Kompilasi Hukum Islam*, h. 47-48.

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Persamaan lain yang dapat di dipahami yakni semua penyebab dari perceraian karena tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga. Penyebab inilah yang merangkul semua faktor-faktor penyebab perceraian yang terjadi di 3 (tiga) Pengadilan Agama tersebut. Diperkuat oleh keterangan dari wakil panitera Pengadilan Agama Sungguminasa

“Inti dari semua penyebab perceraian yang ada disebabkan karena ketidakharmonisan<sup>17</sup>”.

Sedangkan letak dari perbedaan faktor penyebab perceraian adalah tingginya jumlah perkara di kota besar, contohnya Kota Makassar (lihat kolom jumlah perkara). Pengadilan Agama Makassar mendapatkan perkara lebih banyak

---

<sup>17</sup> Tajjudin, Wakil Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa, *Wawancara*, Sungguminasa, 11 Juni 2014.



dibandingkan dengan Pengadilan Agama Maros ataupun Pengadilan Agama Sungguminasa. Hal ini disebabkan beberapa hal seperti yang peneliti kutip dari hasil wawancara seorang hakim<sup>18</sup>:

1. Jumlah penduduk yang padat. Hal ini dapat tergambar dari tabel ini.

Tabel 3  
Jumlah penduduk di Tiga Kabupaten/Kota

Kota/Kabupaten	Tahun		
	2010	2011	2012
Makassar	1.338.663		1.612.413
Maros		322.212	
Gowa	652.941		659.513

Sumber data: Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan<sup>19</sup>

Dari tabel tersebut tergambar bahwa penduduk yang terpadat adalah Kota Makassar, banyaknya penduduk menyebabkan masalah yang kompleks, sehingga Kota Makassar menjadi salah satu daerah yang memiliki tingkat perceraian yang banyak.

2. Daerah Transmigran.
3. Tingkat pendidikan perempuan yang hampir sebanding dengan laki-laki.
4. Daerah wisata seperti Daerah Puncak, Bogor yang merupakan daerah wisata dan turis banyak berdatangan kemudian menikahi gadis-gadis yang ada dan perempuan di daerah tersebut menjadikan perkawinan sebagai

---

<sup>18</sup>Muchtaruddin Bahrum, Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, *Wawancara*, Sungguminasa, 26 Juni 2014.

<sup>19</sup> Dapat diakses di [Http://BPS.go.id](http://BPS.go.id).

sebuah pekerjaan. Setelah turis pergi barulah perempuan menggugat ke Pengadilan Agama.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan beberapa hal:

1. Penyebab perceraian pada 3 (tiga) Pengadilan Agama Makassar, Pengadilan Agama Maros dan Pengadilan Agama Sungguminasa dari Tahun 2011-2013 sebagai berikut.
  - a. Penyebab Moral
    1. Poligami tidak sehat
    2. Krisis Akhlak
    3. Cemburu
  - b. Penyebab Meninggalkan Kewajiban
    1. Kawin Paksa
    2. Ekonomi
    3. Tidak Ada Tanggung jawab
  - c. Kawin di bawah umur
  - d. Penyebab Menyakiti Jasmani
    1. Kekejaman Jasmani
    2. Kekejaman Mental
  - e. Di hukum

- f. Cacat Biologis
  - g. Terus menerus berselisih
    - 1. Politis
    - 2. Gangguan Pihak ketiga
    - 3. Tidak ada Keharmonisan
2. Adapun persamaan faktor penyebab perceraian ketiga pengadilan Agama tersebut terletak pada pedoman ketiga pengadilan tersebut yang sama dalam mengkategorikan penyebab perceraian. Adapun yang digunakan di Pengadilan Agama dalam mengkategorikannya yakni UU. No. 7 Tahun 1974 tentang perkawinan, PP. No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), Sedangkan perbedaannya terletak pada jumlah perkara pada ketiga pengadilan tersebut dengan dominan Pengadilan Agama Makassar, disebabkan beberapa hal:
- a. Jumlah penduduk yang padat
  - b. Daerah Transmigran
  - c. Tingkat pendidikan perempuan yang hampir sebanding dengan laki – laki.
  - d. Daerah wisata seperti Daerah Puncak, Bogor yang merupakan daerah wisata dan turis banyak berdatangan kemudian menikahi gadis-gadis yang ada dan perempuan di daerah tersebut menjadikan perkawinan sebagai sebuah

pekerjaan. Setelah turis pergi barulah perempuan menggugat ke Pengadilan Agama.

### ***B. Impilkasi Penelitian***

Tentu dengan adanya sebuah penelitian akan menimbulkan penemuan baru yang bisa dijadikan sebuah pedoman ataupun rujukan mengenai permasalahan khususnya apa yang dibahas dalam penelitian ini. Setidaknya ada beberapa implikasi yang peneliti harapkan, yaitu:

1. Menjadikan rujukan bagi para pengambil kebijakan ataupun pemerintah dalam mengurangi jumlah angka perceraian atau setidaknya dapat mencari solusi yang konkret bagi permasalahan perceraian yang semakin tahun menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan.
2. Menjadi rujukan bagi tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam mengurangi angka perceraian yang terjadi di lingkungan mereka.
3. Menjadi bahan perenungan terhadap suami istri agar mempertimbangkan dengan matang sebelum mengambil keputusan untuk bercerai dengan pasangannya.
4. Menjadi khazanah keilmuan terhadap orang yang menggunakannya.

### ***C. Saran***

1. Diharapkan agar para pasangan suami istri senangtiasa memelihara hubungan antara suami dan istri dalam bingkai ketaqwaan dan keimanan.

2. Agar baik suami maupun istri lebih bias menyadari fungsi, kewajiban dan tanggung jawabnya di dalam rumah tangga, karena jika diindahkan, bukan tidak mungkin keretakan/goncangan rumah tangga bisa berujung pada perceraian.



## DAFTAR PUSTAKA

- Alam, Andi Syamsu. *Reformasi Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Yapensi, 2004.
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2002.
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam dan Peradilan Agama*. Cet. II; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ali, Zainuddin, Alasan Perceraian dalam ilmu Hukum. *Blog Zainuddin Ali* (20 September 2009), [Http://zainuddin.blogspot.com/2009/09/20/Alasan-Perceraian-dalam-ilmu Hukum.html](http://zainuddin.blogspot.com/2009/09/20/Alasan-Perceraian-dalam-ilmu-Hukum.html). (27 Juni 2014).
- At-Tuwaijiri, Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah. *Ensiklopedi Islam Al – Kamil*. ed. Budiasyah. Cet. XIII; Jakarta: Darus Sunnah Press, 2011.
- Cholid, Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Cet. III; Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009.
- Gassing, Qadir dan Wahyuddin Halim, ed. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Makalah, Skripsi, Tesis dan Disertasi)*. Cet. II; Makassar: Alauddin Press, 2009.
- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Bogor: Kencana, 2003.
- Hidayat, Dani. *Bulughul Mahram Min Adillatil Ahkam versi 2.0*. (4 Juli 2008), [Pustaka\\_alhidayah@yahoo.co.id](mailto:Pustaka_alhidayah@yahoo.co.id) (23 Maret 2010).
- Lamadhoh, Athif. *Fikih Sunnah Untuk Remaja*. Jakarta: Cendikia, 2007.
- Al-Maududi, Abul A'la dan Fazl Ahmed. *Pedoman Perkawinan Dalam Islam*. (Jakarta: Darul Ulum Press, 1999).
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *FIQIH Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Ed. Masykur A.B, Afif Muhammad Idrus Al Kaff. Cet. V; Jakarta: Lentera, 2006.
- Noeh, Zaini Ahmad. *Peradilan Agama Islam di Indonesia*. Cet.I; Jakarta: PT. Intermedia, 1980.
- Prakoso, Djoko dan I Ketut Murtika. *Azas – azas Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987.
- Rahman, Abdul. *Perkawinan dalam Syariat Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Undang – undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum islam*. Cet. IV; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002.
- Rasyid, Chatib dan Syaifuddin. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik Pada Peradilan Agama*. Jakarta: UII Press, 2008.

- Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Sekretariat Negara, Jakarta
- Republik Indonesia. *Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan undang-undang no. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Sekretariat Negara, Jakarta.
- Republik Indonesia. *Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Sekretariat Negara, Jakarta.
- Republik Indonesia. *Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Sekretariat Negara, Jakarta.
- Salim, Amru Abdul Mun'im. *Fikih Thalak Berdasarkan Al - Qur'an & Sunnah*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2005.
- Sholihul, A. *Undang-Undang Perkawinan: dilengkapi Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Rona Publishing, 2012.
- Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. PT. Raja Grafindo Persada: Rajawali Pers, 2004.
- Sya'rawi, Syaikh Mutawalli As. *Fikih Perempuan (Muslimah)*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Tidak Organisme Pemicu Perceraian di Makassar. (Liputan). *Tribun Timur*, 2 November 2013
- Thalib, Muhammad. *15 Penyebab perceraian dan Penanggulangannya*. Bandung: Irsyad Baitus Salam (IBS), 1997.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UIP, 1981.
- Tribun Timur News, "Permohonan Dispensasi kawin di bawah umur kian meningkat di Yogyakarta" (8 April 2013), [Http://tribuntimurnews.com/regional/2013/04/08/Permohonan-dispensasi-kawin-di-bawah-umur-kian-meningkat-di-Yogyakarta](http://tribuntimurnews.com/regional/2013/04/08/Permohonan-dispensasi-kawin-di-bawah-umur-kian-meningkat-di-Yogyakarta). (27 Juni 2014)
- Ukik, Mas. "Kawin paksa". *Blog mas ukik*. [Http://kompasiana.com/post/read/624781/3/kawin-paksa.html](http://kompasiana.com/post/read/624781/3/kawin-paksa.html) (27 Juni 2014).
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. *Metode Penelitian Sosial*. Cet. V; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004.
- Wikipedia. *Poligami*. <http://wikipedia.org/wiki/poligami> (27 Juni 2014)
- Wanita tips.com. *Faktor – Faktor Penyebab Retaknya Keharmonisan Rumah Tangga* (12 Maret 2013), [Http://wanita-tips.com/wanita-tips-faktor – faktor-penyebab-retaknya-keharmonisan-rumah-tangga.html](http://wanita-tips.com/wanita-tips-faktor-faktor-penyebab-retaknya-keharmonisan-rumah-tangga.html). (27 Juni 2014)
- Zuhriah, Erfaniah. *Peradilan Agama Indonesia*. Yogyakarta; UIN Malang Press, 2008.



## Riwayat Hidup



Nama : ISMI ABDULLAH  
TTL : Makassar, 06 September 1992  
NIM : 10100110017  
Alamat : Jl. Kumala 2 Lrng 1 No. 23,  
Makassar  
Facebook : Ismi Abdullah  
Email : ismiabdullahislamic@yahoo.com  
Pin BBM : 7589C79D

Penulis mengenal pendidikan formal pertama pada tahun 1997 di Taman Kanak-kanak (TK) Aisyah, Makassar dan yang merupakan tempat penulis dibesarkan, setelah selesai kemudian melanjutkan ke SDN. Labuang Baji Bertingkat, Makassar. Di tahun 2004 penulis melanjutkan ke Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTSN) Model Makassar. 3 (tiga) tahun kemudian menyelesaikan SLTP tepatnya pada tahun 2007. Di tahun yang sama pula, penulis melanjutkan ke jenjang selanjutnya yakni Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 02 Model Makassar dan berada di Jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). 3 (tiga) tahun pula penulis menyelesaikan pendidikan di MAN di tahun 2010. dalam penimbaan ilmu di tiga tahun terakhir sebelum masuk ke perguruan tinggi, penulis banyak mendapat pengalaman dan bagaimana rasanya berjuang untuk hidup.

Di tahun yang sama, penulis mendaftar di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. Penulis lulus di UIN Alauddin tepatnya jurusan Peradilan Agama. Rasa syukur tak henti penulis ucapkan, karena diberikan kesempatan untuk berproses Perguruan Tinggi di UIN Alauddin dan berharap dikemudian hari ilmu yang diberikan oleh dosen, maupun teman seperjuangan Jurusan Peradilan Agama dapat menjadi bekal dunia dan akhirat, terlebih dengan mengamalkannya pula. Teruntuk kedua orang tuaku terima kasih atas semuanya yang kalian berikan dan tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.